

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kesejahteraan masyarakat dapat diartikan sebagai kondisi di mana terpenuhinya kebutuhan dasar dan non-dasar individu dalam suatu komunitas, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan, secara memadai. Kesejahteraan tercapai ketika masyarakat memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, rasa aman, serta peluang untuk meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, kesejahteraan juga mencakup aspek sosial, seperti solidaritas dan kepercayaan, serta keberlanjutan lingkungan untuk mendukung kehidupan yang layak dan berkelanjutan.

Konsep kesejahteraan masyarakat juga mencerminkan hasil akhir dari pembangunan yang berorientasi pada peningkatan taraf hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan, tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan utama pembangunan, baik di tingkat lokal maupun nasional. (Novita Riyanti & Hermawan Adinugraha, 2021).

Menurut(Ummah, 2019), kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari pendapatan atau kekayaan materi, tetapi lebih pada kemampuan individu untuk mencapai hidup yang mereka nilai berharga melalui apa yang disebut kapabilitas. Kapabilitas ini merujuk pada kebebasan untuk memilih dan melakukan fungsi-fungsi yang dihargai, seperti pendidikan, kesehatan, dan hubungan sosial. pentingnya distribusi yang adil dalam masyarakat, karena ketidaksetaraan dapat membatasi kemampuan individu untuk mencapai (Novita Riyanti & Hermawan Adinugraha, 2021)kesejahteraan. Jadi, kesejahteraan harus dilihat dalam konteks kebebasan dan kesempatan yang dimiliki oleh setiap individu untuk menjalani kehidupan yang mereka pilih,

dengan dukungan dari kebijakan publik yang memadai.

Kesejahteraan masyarakat, harus mencakup pada pemenuhan kebutuhan dasar dan non-dasar individu, kesempatan yang setara untuk meningkatkan kualitas hidup, serta terciptanya solidaritas sosial dan keberlanjutan lingkungan. Seperti apa yang telah dijelaskan konsep ini mengarah pada pencapaian kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi masyarakat. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), sebagai lembaga yang dikelola oleh pemerintah desa, berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan ini. Melalui pengelolaan berbagai usaha, BUMDes membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti penyediaan pangan, dan layanan lainnya yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah entitas ekonomi yang dibentuk oleh masyarakat desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi desa. BUMDes dibangun untuk memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya lokal yang melimpah, baik dalam bentuk sumber daya alam maupun sumber daya manusia, sehingga dapat menghasilkan keuntungan bagi desa dan masyarakatnya (Hidayah et al., 2018).

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) adalah lembaga yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah desa untuk mengelola potensi ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes bertujuan untuk mengembangkan usaha yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi desa melalui berbagai program dan kegiatan, seperti penyediaan barang dan jasa atau pengelolaan sumber daya alam yang ada. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan keuntungan yang dihasilkan dari BUMDes dapat menciptakan Pendapatan Asli Desa (PADes), dan memperbaiki akses terhadap layanan penting, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus berbeda dari lembaga ekonomi lain agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah entitas hukum yang dibentuk oleh desa atau bersama dengan desa-desa lainnya. BUMDes bertujuan untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, serta menyediakan layanan atau usaha lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Untuk mencapai hal tersebut, kinerja BUMDes menjadi faktor kunci yang menentukan seberapa efektif lembaga ini berfungsi dalam memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan desa. Kinerja BUMDes dapat diartikan sebagai ukuran efektivitas dan efisiensi pengelolaan serta dampak yang dihasilkan oleh Bumdes terhadap masyarakat desa. Kinerja yang baik dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi Bumdes dalam meningkatkan pendapatan desa, menciptakan lapangan kerja, serta keberhasilan dalam menjalankan usaha yang berkelanjutan. Selain itu, kinerja BUMDes juga dapat dilihat dari sejauh mana lembaga ini mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pasar, mengembangkan inovasi dalam usaha yang dikelola, serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, baik dari sektor publik maupun swasta. Pengelolaan yang profesional, keterlibatan aktif masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya desa yang tepat akan mendukung pencapaian tujuan BUMDes tersebut.

Dengan pengelolaan yang baik, BUMDes dapat mengoptimalkan potensi lokal, baik dari segi sumber daya alam maupun potensi sosial yang ada di desa. Hal ini berkontribusi pada distribusi ekonomi yang lebih adil, di mana masyarakat desa mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup mereka. BUMDes juga dapat meningkatkan kapabilitas individu, yang mengarah pada kesejahteraan bukan hanya dari segi ekonomi, tetapi juga kebebasan untuk memilih dan mengakses layanan yang mereka butuhkan.

Selain itu, BUMDes memiliki potensi untuk memperkuat solidaritas sosial di tingkat desa, karena usaha-usaha yang dijalankan sering kali melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan demikian, BUMDes tidak hanya mendukung pemberdayaan ekonomi, tetapi juga memperkuat aspek sosial yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Untuk memperbaiki kondisi ini, perlu ada fokus pada pemberdayaan masyarakat desa, peningkatan akses terhadap infrastruktur dan layanan publik, serta distribusi sumber daya yang lebih adil agar pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Perlunya distribusi sumber daya yang lebih adil serta pemberdayaan masyarakat desa untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. (Engkus et al., 2021)

Peran penting BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa semakin diperkuat dengan adanya dukungan dari Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2017 yang mencabut Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes. Perda ini mengacu pada perubahan kerangka hukum dengan mengadopsi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 yang mengatur secara lebih rinci tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran BUMDes.

Dengan demikian, kebijakan publik, seperti yang diatur dalam Perda No. 2 Tahun 2017, menjadi alat pemerintah untuk menyesuaikan strategi tata kelola BUMDes. Ini bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan ekonomi desa, memberdayakan masyarakat, dan memastikan bahwa nilai-nilai hukum dan sosial dijalankan melalui otoritas pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat perdesaan.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 (Sekretariat Website JDIH BPK, 2021) tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan untuk mengatur pendirian, pengelolaan, dan pengembangan

BUMDes sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kebijakan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. BUMDes didefinisikan sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi, menyediakan layanan umum, dan menciptakan nilai tambah atas potensi ekonomi desa.

Pengelolaan BUMDes dilakukan dengan prinsip profesionalisme, keterbukaan, tanggung jawab, keberlanjutan, dan gotong royong. Namun, meskipun kebijakan telah dirancang sedemikian rupa untuk mendukung pencapaian tujuan, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Sebagai salah satu badan usaha milik desa, BUMDes Putera Mandiri Desa Putrajawa memiliki peran strategis dalam mengelola potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai permasalahan yang menghambat optimalisasi kinerja BUMDes. Permasalahan-permasalahan ini tidak hanya memengaruhi efektivitas pengelolaan potensi desa, tetapi juga berdampak pada tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan dan program yang dijalankan.

Meskipun Desa Putrajawa memiliki sumber daya lokal yang melimpah, seperti lahan potensial untuk wisata perkebunan atau aktivitas pertanian yang produktif, pengelolaannya melalui BUMDes Putera Mandiri belum mampu sepenuhnya meningkatkan produktivitas desa. Banyak potensi yang ada, seperti pemanfaatan lahan yang hanya digunakan untuk konsumsi pribadi dan tidak dikembangkan menjadi komoditas bernilai ekonomi, sehingga tidak memberikan kontribusi maksimal bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat maupun desa.

Hal ini disebabkan oleh rendahnya produktivitas, yang berhubungan langsung dengan kemampuan BUMDes dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan hasil yang optimal.

Produktivitas, dalam konteks ini, mengacu pada kemampuan untuk menghasilkan output yang lebih besar dengan sumber daya yang ada, baik dalam bentuk produk unggulan maupun peluang usaha yang dapat meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat. Rendahnya produktivitas ini tercermin dari kurangnya strategi dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa BUMDes belum sepenuhnya berfungsi sebagai pendorong utama perekonomian desa.

Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dan pengurus BUMDes Putera Mandiri menjadi salah satu permasalahan yang memengaruhi efektivitas pengelolaan potensi desa. Hubungan yang tidak terjalin dengan baik ini menyebabkan pengurus BUMDes sering kali tidak mampu menangkap kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara akurat. Sebagai akibatnya, program-program yang dirancang sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kurang mendapat dukungan penuh dari warga desa. Selain itu, minimnya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau terlibat aktif dalam musyawarah desa semakin memperlebar kesenjangan antara pengurus BUMDes dan masyarakat, sehingga menghambat tercapainya tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Selain itu, keterbatasan akses informasi yang dimiliki oleh masyarakat terkait program-program BUMDes, yang sering kali tidak dipublikasikan secara luas atau disampaikan dengan cara yang mudah dipahami oleh semua kalangan. Contohnya, pada Unit Kerajinan Bambu Kreatif, masyarakat yang memiliki keahlian membuat produk anyaman tidak mendapatkan pelatihan atau informasi yang cukup tentang cara meningkatkan nilai jual produk mereka, sehingga potensi ekonomi desa tidak berkembang secara optimal.

Dalam hal ini, perlunya responsivitas yang baik karena merupakan salah satu dimensi penting dalam pengelolaan organisasi publik yang mengacu pada kemampuan organisasi untuk memahami dan merespons kebutuhan, aspirasi, dan permasalahan masyarakat secara tepat. Dalam konteks BUMDes Putera Mandiri Desa Putrajawa, kurangnya komunikasi dan koordinasi yang

efektif antara pengurus dan masyarakat mencerminkan rendahnya tingkat responsivitas organisasi.

Situasi ini menunjukkan bahwa pengelola BUMDes belum sepenuhnya tanggap dalam mengidentifikasi dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat, sehingga kebijakan dan program yang dijalankan sering kali kurang relevan dengan kondisi lokal. Oleh karena itu, peningkatan responsivitas melalui komunikasi yang lebih inklusif dan koordinasi yang terarah menjadi langkah penting untuk memperbaiki pengelolaan BUMDes agar lebih sesuai dengan harapan masyarakat dan memberikan dampak yang lebih optimal.

Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu kendala utama dalam pengelolaan BUMDes Putera Mandiri Desa Putrajawa. Kesulitan dalam menemukan tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman berdampak pada kurangnya pengembangan dan inovasi dalam program-program usaha yang dikelola. Hal ini tercermin dari struktur pengelolaan usaha BUMDes Putera Mandiri, seperti terlihat pada tabel berikut

Tabel 1. 1
Jumlah SDM Pegawai BUMDes

No	Jabatan	Nama	Pendidikan	Unit/Bidang
1.	Ketua (Direktur)	Cecep Hendra	S2	-
2.	Sekretaris	Ihin Solihin	S1	-
3.	Bendahara	Hildan Hermawan	SMA	-
4.	Kepala Unit	Assadudin	SMA	Air Oxydes
5.	Pegawai	Dinan Rakhman	STM	Air Oxydes
6.	Pegawai	Opik	SMK	Air Oxydes
7.	Kepala Unit/Pegawai	Utang Syarifuddin	SMA	Barang & Jasa
8.	Kepala Unit/Pegawai	Ahdi	SMA	Bambu Kreatif

Sumber : BUMDes Desa Putrajawa (Diolah Peneliti, 2024)

Berdasarkan data struktur kepegawaian yang diunggah, BUMDes Putera Mandiri Desa Putrajawa memiliki beberapa jabatan strategis seperti Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, dengan pendidikan masing-masing S2, S1, dan SMA. Namun, mayoritas pegawai yang mengisi posisi Kepala Unit dan unit-unit lainnya memiliki latar belakang pendidikan SMA, STM, atau SMK. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus dan pengalaman profesional yang memadai.

Keterbatasan ini berdampak signifikan pada pengelolaan program usaha, terutama dalam hal inovasi dan pengembangan program. Keterbatasan tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman berdampak pada rendahnya produktivitas organisasi dalam menghasilkan output yang optimal dari unit-unit usaha yang dikelola. Selain itu, kurangnya kompetensi pegawai juga memengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat, seperti inovasi produk dan kepuasan pengguna layanan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia sangat diperlukan untuk mendukung kinerja BUMDes secara keseluruhan. Dalam hal ini BUMDes Putera Mandiri memiliki empat unit kegiatan usaha yang beragam. Diantaranya :

Tabel 1. 2
Unit BUMDes Putra Mandiri Desa Purajawa

No	Program Kerja	Kepala Unit
1.	Unit Air oxydes	Assadudin
2.	Unit Kerajinan Bambu Kreatif	Ahdi
3.	Unit Sewa Alat Pesta	U. Syarifudin

Sumber : BUMDes Desa Putrajawa (Diolah Peneliti, 2024)

Berdasarkan tabel diatas terdapat beberapa unit BUMDes yang terdapat di Desa Putrajawa diantaranya Pertama Unit Air Oxydes berfokus pada penyediaan air berkualitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kedua, Unit Kerajinan Bambu Kreatif menghasilkan berbagai produk inovatif berbahan dasar bambu, yang mencerminkan kreativitas dan kearifan lokal.

Ketiga, Unit Barang Jasa menyediakan berbagai perlengkapan untuk mendukung berbagai acara masyarakat. Ketiga unit usaha ini saling melengkapi dalam memberikan kontribusi positif bagi komunitas sekitar.

Rendahnya promosi produk dan layanan yang dilakukan oleh BUMDes Putrajawa berkontribusi pada minimnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap usaha yang dikelola. Strategi pemasaran yang tidak optimal menyebabkan produk-produk BUMDes sulit bersaing dengan kompetitor, bahkan di pasar lokal. Dampaknya, masyarakat kurang tertarik untuk mendukung atau memanfaatkan layanan BUMDes, sehingga potensi ekonomi lokal tidak tergarap maksimal. Dampak langsung dari permasalahan ini tercermin dalam tabel pendapatan BUMDes Desa Putrajawa Tahun 2021–2023 berikut:

Tabel 1. 3
Data Pendapatan BUMDes Desa Putrajawa Tahun 2021-2023

No	Tahun	Pendapatan Unit			Jumlah
		Air Oxydes	Bambu Kreatif	Barang & Jasa	
1	2021	Rp 4.000.000	Rp 7.300.000	Rp 3.250.000	Rp 14.550.000
2	2022	Rp 3.600.000	Rp 5.020.000	Rp 4.150.000	Rp 12.750.000
3	2023	Rp 3.000.000	Rp 6.050.000	Rp 2.950.000	Rp 12.000.000

Sumber : Laporan Pendapatan BUMDes Desa Putrajawa Tahun 2021-2023 (Diolah Peneliti, 2024)

Data pendapatan BUMDes Putrajawa periode 2021-2023 menunjukkan dinamika yang signifikan di masing-masing unit usaha, yaitu Unit Air Oxydes, Unit Kerajinan Bambu Kreatif, dan Unit Barang & Jasa (termasuk Sewa Alat Pesta). Unit Air Oxydes mengalami penurunan pendapatan setiap tahun, dari Rp 4.000.000 pada 2021 menjadi Rp 3.600.000 pada 2022, lalu menurun lagi menjadi Rp 3.000.000 pada 2023. Penurunan ini dapat disebabkan oleh menurunnya kebutuhan masyarakat terhadap produk air Oxydes, persaingan dengan produk serupa yang lebih inovatif, atau kurang optimalnya promosi dan distribusi produk. Dari perspektif kinerja, hal ini mencerminkan tantangan dalam aspek responsivitas BUMDes terhadap

kebutuhan pasar, serta kurangnya tanggung jawab untuk menjaga daya tarik produk.

Berbeda dengan Unit Air Oxydes, Unit Kerajinan Bambu Kreatif menunjukkan pola fluktuatif. Pendapatan unit ini mencapai puncaknya pada tahun 2021 sebesar Rp 7.300.000, tetapi turun menjadi Rp 5.020.000 di tahun 2022, sebelum meningkat kembali menjadi Rp 6.050.000 pada tahun 2023. Penurunan di tahun 2022 dapat disebabkan oleh berkurangnya minat pasar terhadap produk kerajinan tradisional, kurangnya diversifikasi produk, atau keterbatasan dalam promosi di pasar yang lebih luas. Namun, peningkatan di tahun 2023 menunjukkan adanya usaha dari BUMDes untuk memperbaiki responsivitas melalui inovasi produk atau meningkatkan strategi pemasaran. Kinerja ini mencerminkan adanya kesadaran dan tanggung jawab dalam menjawab kebutuhan pasar, meskipun hasilnya belum maksimal.

Unit Barang & Jasa, yang mencakup penyewaan alat pesta, juga menunjukkan fluktuasi. Pendapatan unit ini meningkat dari Rp 3.250.000 pada 2021 menjadi Rp 4.150.000 pada 2022, tetapi kembali menurun ke Rp 2.950.000 pada 2023. Peningkatan di tahun 2022 dapat dikaitkan dengan pemulihan aktivitas sosial masyarakat setelah pandemi COVID-19, seperti pesta pernikahan dan acara komunitas. Namun, penurunan di tahun 2023 mungkin disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat yang melemah atau meningkatnya persaingan dari penyedia jasa serupa. Dari sisi kinerja, penurunan ini mengindikasikan perlunya peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan dan evaluasi program, serta pengembangan strategi pemasaran yang lebih kompetitif.

Penurunan pendapatan ini mencerminkan lemahnya strategi promosi, di mana produk tidak mampu mempertahankan daya saing atau menarik lebih banyak pelanggan. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap produk BUMDes turut mengurangi tingkat konsumsi dan minat partisipasi masyarakat dalam mendukung usaha lokal. Dengan demikian, peningkatan

strategi promosi dan komunikasi dengan masyarakat sangat diperlukan untuk memperbaiki pendapatan dan memastikan keberlanjutan usaha BUMDes Desa Putrajawa.

Dalam penelitian sebelumnya, fokus lebih banyak diarahkan pada aspek-aspek tertentu, seperti manajemen keuangan BUMDes, optimalisasi sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat desa, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan usaha. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara menyeluruh mengevaluasi permasalahan rendahnya promosi produk BUMDes dan kesadaran masyarakat terhadap produk yang ditawarkan, serta dampaknya terhadap kinerja keuangan BUMDes. Selain itu, belum banyak penelitian yang menghubungkan kinerja BUMDes dengan teori kinerja Agus Dwiyanto, yang mencakup dimensi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas, khususnya dalam konteks pengelolaan promosi dan layanan.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan pendapatan BUMDes, penting untuk memperbaiki strategi promosi agar lebih efektif dalam menjangkau masyarakat, sehingga mereka bisa lebih sadar akan produk dan layanan yang ditawarkan. Dengan demikian, kaitan antara permasalahan rendahnya promosi dan pendapatan BUMDes menjadi jelas. Pendapatan yang rendah disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat, yang dapat diatasi dengan meningkatkan upaya promosi dan komunikasi yang lebih baik.

Peneliti menggunakan teori kinerja birokrasi yang dikemukakan oleh Dwiyanto (1995) karena relevansinya dalam menganalisis optimalisasi kinerja BUMDes Putera Mandiri Desa Putrajawa dalam menghadapi berbagai tantangan yang menghambat kesejahteraan masyarakat. Teori ini menguraikan kinerja birokrasi ke dalam empat indikator utama, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, dan akuntabilitas.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai bagaimana optimalisasi kinerja ini

dijalankan dan tantangan serta hambatan yang dihadapi dalam optimalisasi kinerja. Adapun judul dari penelitian ini adalah **“Optimalisasi Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Putrajawa Dalam Mensejahterakan Masyarakat”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Kurangnya optimalisasi potensi ekonomi, meskipun setiap desa memiliki potensi ekonomi, pengelolaan BUMDes di Desa Putrajawa belum sepenuhnya optimal dalam memanfaatkan sumber daya lokal untuk meningkatkan produktivitas.
2. Terdapat kekurangan dalam komunikasi dan koordinasi antara pengurus dan masyarakat, terlihat dari minimnya keterlibatan warga dalam aktivitas BUMDes, serta belum adanya forum terbuka atau media informasi yang aktif untuk menyampaikan program dan layanan.
3. Keterbatasan sumber daya manusia, pengamatan terhadap struktur organisasi menunjukkan bahwa sebagian besar pengelola belum memiliki pelatihan manajerial atau teknis usaha, yang dapat memengaruhi pelaksanaan program dan keberlangsungan unit-unit usaha.
4. Kurangnya promosi dan publikasi produk BUMDes, selama observasi, produk dan layanan yang dikelola belum dipasarkan secara luas, dan tidak ditemukan media promosi aktif baik dalam bentuk cetak maupun digital di lingkungan desa.
5. Ketidakteraturan dalam operasional unit usaha, pada beberapa unit, jadwal pelayanan belum terpampang secara jelas dan belum dijalankan secara konsisten, sehingga berpotensi membingungkan masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana produktivitas kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Putrajawa Dalam Mensejahterakan Masyarakat?
2. Bagaimana kualitas layanan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Putrajawa Dalam Mensejahterakan Masyarakat?
3. Bagaimana responsivitas kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Putrajawa Dalam Mensejahterakan Masyarakat?
4. Bagaimana kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Putrajawa Dalam Mensejahterakan Masyarakat?
5. Bagaimana akuntabilitas kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Putrajawa Dalam Mensejahterakan Masyarakat?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan produktivitas kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Putrajawa Dalam Mensejahterakan Masyarakat.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan layanan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Putrajawa Dalam Mensejahterakan Masyarakat.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan responsivitas kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Putrajawa Dalam Mensejahterakan Masyarakat.
4. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tanggung jawab kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Putrajawa Dalam Mensejahterakan Masyarakat
5. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan akuntabilitas kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Putrajawa Dalam Mensejahterakan Masyarakat.

E. Manfaat hasil Penelitian

1. Teoretis

Penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi pedesaan dan manajemen BUMDes, dengan memberikan wawasan baru tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja lembaga tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan model untuk memahami bagaimana BUMDes berfungsi sebagai alat pemberdayaan masyarakat, serta strategi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan ekonomi desa. referensi bagi studi-studi selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan ekonomi desa.

2. Praktis

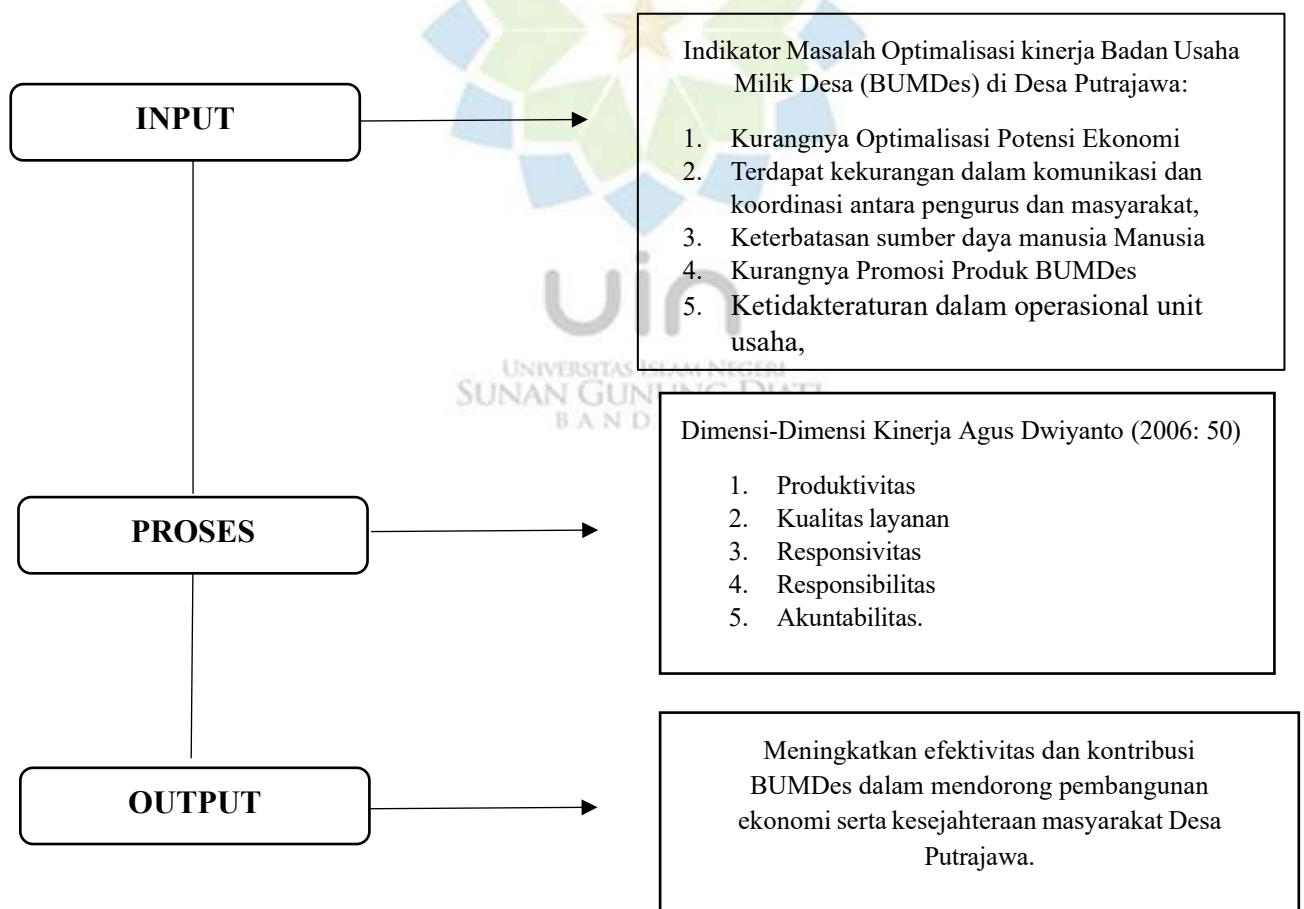
Penelitian ini memberikan rekomendasi yang berguna bagi pengurus BUMDes mengenai cara meningkatkan komunikasi, promosi, dan pengelolaan sumber daya manusia, sehingga dapat memperbaiki kinerja unit usaha yang ada. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BUMDes, desa dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi ekonomi lokal.

Penelitian ini juga mendorong pentingnya pelatihan bagi pengurus dan anggota BUMDes agar memiliki keterampilan yang memadai dalam mengelola usaha, serta dapat menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan BUMDes, termasuk dukungan finansial dan pelatihan bagi pengelola. Dengan pemanfaatan hasil penelitian ini, diharapkan dapat terjadi peningkatan kinerja BUMDes yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial di desa.

F. Kerangka Berpikir

Dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pilar utama pemberdayaan ekonomi di desa, penting untuk mengadopsi pendekatan yang sistematis dan terukur. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kinerja BUMDes di Desa Putrajawa, dengan merujuk pada teori pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh (Dwiyanto, 2006), yang mencakup lima indikator utama: produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. (Ismoyo, 2017)

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Hasil Penelitian (diolah peneliti,2024)